

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Abdulkadir, M. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Badrulzaman, M. D. (2001). Hukum perikatan dalam KUHPperdata. Bandung:
Citra Aditya Bakti.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Fuady, M. (2003). Hukum kontrak di Indonesia: Analisis peraturan dan praktik.
Jakarta: Rajawali Pers.

Fuady, M. (2006). Hukum Perikatan dan *Force Majeure*. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Harahap, M. Y. (2008). Hukum Acara Perdata Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2017). Hukum perikatan dan perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika.

Hernoko, A. Y. (2011). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial. Jakarta: Rajawali Pers.

Hernoko, A. Y. (2019). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak
komersial. Jakarta: Rajawali Pers.

Isnaeni, Moch. (2016) *Hukum Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Khairandy, R. (2014). Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta:
Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2020). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Penada Media
Group.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University
Press

- Mulyadi, M. (2009). Hukum acara perdata Indonesia: Suatu tinjauan teoritis dan praktis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. (1986) Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, S. (2009). Hukum perdata: Suatu pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2010). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press.
- Satrio, J. (1999). Hukum perikatan: Perikatan pada umumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2019). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schwenzer, I. (2019). *Force majeure* and hardship in international sales contracts. Journal of International Contract Law
- Siaga, N. A. (2025). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Bisnis. Lex Privatum .
- Setiawan, A. (1987). Hukum Perikatan dan Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, R. (2010). Hukum Perjanjian dan *Force Majeure* di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (1975). Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Subekti. (2001). Pokok-pokok Hukum Perikatan. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (2009). Hukum perdata Indonesia: Pokok-pokoknya. Jakarta: Intermasa.
- Soeroso, R. (2011). Pengantar hukum perdata Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Treitel, G. H. (2020). *The Law of Contract* (15th ed.). London: Sweet & Maxwell.

UNIDROIT. (2016). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016* (Art. 7.1.7).

Wardatul, F. (2020). *Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Perspektif Hukum Kontrak*. Jakarta: Deepublish.

Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Artikel Dalam Jurnal

Ardhya, S. N. (2020). TINJAUAN YURIDIS BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN INDONESIA). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2*, 186-196.

Arsawan, I. G. Y. (2021). Keabsahan Klausul Pembebasan Kewajiban Akibat *Force Majeure* Dalam Akta Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 23/PDT.G.S/2019/PN PAL). *Indonesian Notary*, 3(2), 269–290.

Claudia Soleman. (2018). "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*. 6(5):12-17.

Dantes, K. F. (2019). KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP PUTUSAN PAILIT . *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 95-101.

Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH CAMAT DALAM KEDUDUKANNYA

SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT . Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 905–916.

Dantes, K. F. (2021). Dampak hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan suami istri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan pisah harta. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 917–923.

Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah(BPKPD) Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(1), 486–494.

Duti, E. M., Syahda, N., & Audyta, S. S. (2025). Pengaruh keadaan memaksa (*force majeure*) terhadap tanggung jawab debitur dalam perikatan. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 12(5), 131–140.

Habeahan, B., & Siallagan, S. R. (2021). Tinjauan hukum keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi COVID-19. Nommensen Journal of Legal Opinion, 2(2), 168–180.

Hasna. (2022). *Force Majeure* in Aircraft Lease Agreement and Covid-19: Indonesian and English Law Perspectives. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law): Vol. 9: No. 1, 89-110.

Hilmy, M. I., & Yusuf, M. F. (2025). Praktik dan disparitas putusan hakim dalam menetapkan *force majeure* di Indonesia. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 1(2).

Hoirullah, & Rumainur. (2022). Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Keadaan Memaksa Terhadap Suatu Perjanjian Bisnis Dalam Keadaan

Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Binamulia Hukum* Volume 11, Nomor 2,, 105-115.

Isradjuningtias, A. C. (2015). *FORCE MAJEURE (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA*. *Veritas et Justitia*, Vol. 1 No. 1, 136-158.

Jamil, K., Nury, & Rumawi. (2020). *IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA*. Kertha Semaya.

Jusuf, M. F. F. (2025). Penggunaan klausul *force majeure* dalam pelaksanaan kontrak pada masa pandemi COVID-19. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6177–6189.

Kamilah, N., Putra, A., & Santoso, R. (2025). Pemaknaan *Force Majeure* dalam Perjanjian Sewa Menyewa: Tinjauan Yuridis dan Praktis. *Jurnal Hukum Lex Privatum*.

Khilmi, F. M., & Triana, N. (2025). *Force Majeure* dalam sistem hukum Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(1).

Kurniawan, R., & Noer, Z. (2024). *A contract reviewed from the perspective of civil law in Indonesia may be delayed due to force majeure*. *IBLAM Law Review*, 4(1), 135–148.

Maliq, A. A., Thahir, A., Faliskha, A. N., Azhari, F., & Surahmad. (2024). Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Kontrak Bisnis. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 291-297.

Manan, A. (2020). Aspek Hukum *Force Majeure* dalam Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 335–349

- Manik, S. M., Nursy, I., Amidah, S. P., Nurhaliza, S., Aziz, M. A., Febrianti, A. P., et al. (2025). Urgensi Klausul Force Majueure dalam Drafting Kontrak Bisnis Pasca Pandemi COVID-19 . SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah , 3568-3582.
- Pontoh, S. C., Sahril, I., & Marniati , F. S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Yang Telah Membayar Lunas Terkait Pengakhiran Perjanjian Sewa Akibat Keadaan Kahar. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia .
- Raisya, A., Suhendra, C. D., Sastraatmaja, K. N., & Parhusip, N. I. (2025). Analisis *Force Majeure* dan Implikasinya terhadap Perjanjian Kredit. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS) , 1251-1262.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian hukum keadaan memaksa (*force majeure*) menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, 4(2).
- Sari, R. A., & Pratama, Y. (2021). Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan Relevansinya dengan *Force Majeure*. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi, 5(2), 233–250.
- Sari, R., & Nugroho, A. (2020). Analisis *force majeure* dalam hukum perdata Indonesia: Pendekatan ketidakmungkinan absolut vs. kesulitan berlebihan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2),
- Simanjuntak, J. (2021). Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 12(1), 45–56.
- Sudiby, M. (2019). Konsepsi Wanprestasi dan *Force Majeure* dalam Hukum Perdata. Jurnal Hukum Media Justitia, 15(1), 75–89.
- Sukmaningsih, N. I. (2024). KONFLIK DAN HARMONISASI PENOLAKAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI: STUDI TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS. Jurnal Hukum Vol. 12 No. 1, 77-87.

Tampoli, A. (2021). Pengertian dan penerapan *force majeure* dalam perjanjian perdata. Lex Privatum

Tampoli, I. A., Rumimumpunu, D., & Umboh, K. Y. (2021). TINJAUAN HUKUM PEMBEBASAN GANTI RUGI DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DITINJAU DARI KUHPERDATA. Lex Privatum Vol. IX/No. 12, 47-56.

Tivonli, K., Respationo, S., Erniyanti, & Fadlan. (2023). Analisis Yuridis Pencantuman Klausul *Force Majeure* dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengelolaan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Kota Batam). UNES Law Review, 6(1).

Artikel Elektronik

Salma. (2023, Maret 09). Pengertian Metode Penelitian, Tujuan, Macam, dan Contoh Lengkapnya. <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-metode-penelitian/>.

Fitriya. (2025, Agustus 12). Berapa Tarif Service Charge PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Perhitungannya? <https://klikpajak.id/blog/service-charge-pph-pasal-4-ayat-2/>.

Skripsi

Manik, S. (2021) Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Atas Putusnya Perjanjian Sewa Menyewa Akibat Keadaan *Force Majeure* (Studi Putusan Nomor 307/Pdt/2019/PT MDN). Universitas Medan Area.

Purnamawati, H. (2022) Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan
Kontrak. Universitas Islsm Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 157. Sekretarian Negara. Jakarta

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 723/PDT/2021/PT DKI.

